

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019
- Alatas, Syed Husein. *Corruption and the Destiny of Asia*. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall. 1999. .
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2010.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- _____. *Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 2013.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Chazawi Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. 2008.
- _____. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Banyumedia. 2003.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Fuller, Lon. L. *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press. 1964.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 11th Edition*. West. 2014.
- H. S, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke III. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Herimulyanto, Agustinus. *Sita Berbaris Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Jumroh, Kalimatul & Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu: Zigie Utama, 2019
- Kansil, CST. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2009.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 1998.
- Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
- _____. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka. 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan 7. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia. 1987.
- _____. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco. 1980.

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Reeve, James M., Carl S. Waren., Jonathan E. Duchae. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Rosikah, Chatrina Darul & Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2001.
- Santoso, Sam. *The Art of Corruption*. Cetakan 1. Yogyakarta: Jawa Pos Press. 2003.
- Sendra, Ketut. *Klaim Asuransi Gampang!*. Jakarta: PPM. 2009.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Revika Aditama. 2006.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggunggaan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM. 2018.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pres. 2011.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Suhendi, Hendi & Deni K Yusuf. *Asuransi Takaful Dari Teoritis ke Praktis*. Bandung: Mimbar Pustaka. 2005.
- Sula, Muhamad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sumanto, Agus Edi, et. al. *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita. 2009.

- Supriyanti. *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil & Menengah Berbasis Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.
- Syah, Moh. Ma'ruf. *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*. Surabaya.
- Wahyuni, Sri & Rifki Khoirudin. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Penerbit Nas Media Pusaka. 2020.
- Yahya, Bettina, et. al. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2007.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Korupsi (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- B. Jurnal**
- Bidari, Ashinta Sekar. "Fenomena Korupsi Sebagai Patologi di Indonesia". Jurnal UNSA. Volume 1. Nomor 5. 2014.
- Hidayah, Astika Nurul. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi". Jurnal Kosmik Hukum. Volume 18. Nomor. 2. 2018.
- Hikmawati, Puteri. "Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal DPR RI. Volume XI. Nomor 05. Maret 2019.
- Karnia, Vani, et. al. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1. Nomor 3. 2020.

<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230> Diakses pada tanggal 18 November 2023, Pukul 20.19 WIB.

Mahrus Ali. “*Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Lex Administratum. Volume III, Nomor 1. Januari-Maret. 2015.

Saragih, Yasmirah. “*Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”. Jurnal Hukum. Volume 5. Nomor 5. Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Sumber Lainnya

Ardisasmita, M. Syamsa. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel”. Disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, 23 Agustus 2006.

Anti Corruption Clearing House. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam Perampasan Aset di Indonesia”. 16 Juni 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. “Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007.

Muladi. “Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi”. Makalah Seminar. 27 April 2000.

- Dewan Perwakilan Rakyat, “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Februari 2023. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-LAPORAN-SINGKAT-RAPAT-KERJA-DENGAN-KOMISI-PEMBERANTASAN-KORUPSI-1678172135.pdf> diakses pada tanggal 24 Desember 2023
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta: KPK. 2015. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pedoman-pengendalian-gratifikasi> diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 19.18 WIB.
- Laksono, Dave Akbarshah Fikarno. “Hari Antikorupsi Dan Etos Pengembalian Aset Korupsi”. *Okezone.com*. 2016. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024, melalui <https://news.okezone.com/read/2016/12/06/337/1559716/opini-hari-antikorupsi-dan-etos-pengembalian-aset-korupsi>
- Anonim. “Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain”. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> . diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 16.11 WIB.
- Pambudhy, Agung. Detik News. “MA Kembali Tolak Eks Gubernur Sultra Nur Alam yang Korupsi 4,3 Triliun”. <https://news.detik.com/berita/d-5867095/ma-kembali-tolak-pk-eks-gubernur-sultra-nur-alam-yang-korupsi-rp-4-3-triliun> diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 8.22
- Merdeka. “Data ICW: Kerugian Negara Rp39,2 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Hanya Rp2,3T” <http://m.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uangpengganti-dari-korupsi-hanya-rp23-t.html> diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 16.17 WIB.
- Transparency International Indonesia. “*Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia*” <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> . diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 02.40 WIB.

Tama S Langkon, “Dialog Program Televisi CNN Indonesia “Sanksi Pidana Diganti Pengembalian Uang Korupsi?” 2017. Diakses 6 Juni 2024
Uki.ac.id, Seminar Nasional “Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Diakses pada 6 Juni 2024.

